



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF SUDARTO TRINUGROHO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **61047**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.260.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI		Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI		Rp. 800.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.000.000
1. MOBIL, HONDA CR-V SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI		Rp. 215.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI		Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 1979, HASIL SENDIRI		Rp. 5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	218.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.595.617.020
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.374.117.020
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.374.117.020

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.